



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WIDODO SUGIRI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 743003

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.345.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/78 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 585.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/117 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 785.000.000
4. Tanah Seluas 641 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **712.000.000**

1. MOTOR, HONDA CS1 Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA X1H02N35M1 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
3. MOTOR, HONDA D1A02N15M1 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA NC1241CF A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
5. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 V A/T (GUNI42R-MDTHXI) Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000
6. MOBIL, TOYOTA TOYOTA RAIZE Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
7. MOTOR, HONDA VIJO2060L1 A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI



Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 34.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 183.400.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.274.900.000

III. HUTANG

Rp. 518.175.539

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.756.724.461

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.